

OMBUDSMAN MENILAI MASIH ADA HAMBATAN DIHADAPI PEMPROV JABAR DALAM VAKSINASI

Kamis, 28 Januari 2021 - Marzuqo Septianto

DESKJABAR-Â Kepala PerwakilanÂ [Ombudsman](#)Â RI Jabar,Â [Dan Satriana](#)Â menyatakan menilai masih ada hambatan dihadapi oleh PemerintahÂ Provinsi Jawa Barat ([Pemprov Jabar](#)) dalam upaya melakukanÂ [vaksinasi](#).

Salah satunya masih banyaknya data Tenaga Kesehatan yang belum di-input terutama pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta, Data Sasaran Vaksin yang tidak merata pada masing-masing Fasyankes, dan Deadline waktu registrasi yang tidak jelas menyebabkan timbulnya kesulitan dalam penghitungan target cakupan dan kebutuhan vaksin.

Demikian diungkapkan Dan Satriana saat melakukan zoom meeting bersama pihak-pihak yang menyelenggarakanÂ [vaksinasi](#)Â Covid-19, Selasa 26 Januari 2021.

MenurutÂ [Dan Satriana](#)Â dalam pelaksanaanÂ [vaksinasi](#)Â Tahap I termin I, capaian targetÂ [vaksinasi](#)Â hanya 25% disebabkan adanya calon penerima vaksin yang gagal di vaksin karena tidak lolos skrining yang menyebabkan tidak boleh di vaksin atau ditunda pelaksanaannya serta penerima vaksin tidak hadir.

Hambatan juga ditemui pada penggunaan Aplikasi PCare dimana banyak tenaga kesehatan yang telah melakukan registrasi melalui SISDMK namun nama nya belum terdaftar atau terintegrasi sehingga tenaga kesehatan tersebut tidak dapat di vaksin meskipun Vaksin nya tersedia namun nama tidak ada pada sistem aplikasi Pcare.

Mengenai Kejadian Ikutan Pascainmunisasi (KIPI) / Vaccine Safety, bahwa deteksi dan pelaporan KIPI merupakan langkah awal untuk memperkuat monitoring keamanan vaksin (vaccine safety). Adapun meningkatnya keamanan vaksin linier dengan peningkatan keamanan pasien (patient safety).

Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah terkait KIPI adalah belum adanya aturan yang menjelaskan tentang pembiayaan KIPI, apakah dibebankan pada pemerintah daerah ataukah oleh pemerintah pusat, sehingga hal tersebut membuat gamang pemerintah daerah.

MenurutÂ [Dan Satriana](#),Â [Ombudsman](#)Â menilai masih banyak ditemui hambatan serta permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan Program Vaksin di Jawa Barat dimana permasalahan Data Base serta Aplikasi menjadi hal utama selain pada permasalahan teknis, sarana prasarana serta SDM yang tersedia.

Namun demikianÂ [Ombudsman](#)Â RI juga mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam hal menanggulangi serta mengatasi hambatan dan permasalahan yang ditemui antara lain koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, baik Kemenkes RI dan BPJS terkait Data dan Aplikasi, pembuatan aturan dan SOP penyelenggaraan di daerah, penyediaan sarana-prasarana, pelatihan SDM serta penyediaan Anggaran baik untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, Monitoring Evaluasi serta manajemen KIPI.

Selain itu juga yang menjadi perhatian penting bagiÂ [Ombudsman](#)Â adalah penyiapan Pengelolaan Pengaduan baik ditingkat Fasilitas Kesehatan Pelaksana Vaksinasi maupun berjenjang sampai ke tingkat Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

[Ombudsman](#)Â dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan sebagai mitra penyelenggara pelayanan publik tetap mengawal Program Vaksinasi Covid 19 di Indonesia, dan berharap Program tersebut dapat berjalan lancar dan sukses serta segala hambatan dan permasalahan dapat diatasi dengan cepat dan tepat.